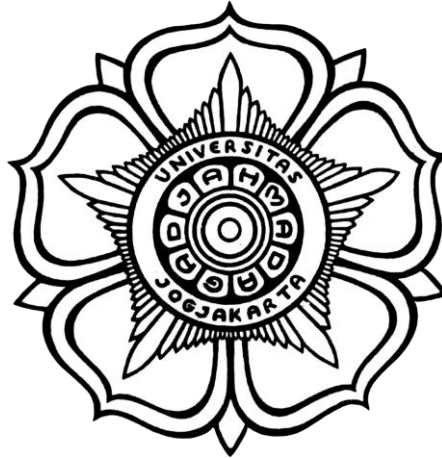


**REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
UNTUK MEREDUKSI KONFLIK SOSIAL
STUDI KASUS DI SAMPANG, MADURA**



Ermı Suhasti Syafei

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
ermi.syafei@uin-suka.ac.id

**Dipresentasikan pada Konggres Pancasila ke-V
di Balairung UGM Yogyakarta
1 Juni 2013**

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MEREDUKSI KONFLIK SOSIAL STUDI KASUS DI SAMPANG, MADURA¹

Ermi Suhasti S.²

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta

ermi.syafei@uin-suka.ac.id

Abstrak

Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Negara senantiasa mengapresiasi keberagaman budaya dan agama (pluralisme). Meskipun untuk mewujudkan sikap toleransi, dialog lintas budaya dan agama, selalu mendapat berbagai tantangan, negara selalu mempunyai niat dan iktikad baik. Keinginan negara yang senantiasa mengedepankan toleransi, multikultural, sering bertolak belakang dengan kondisi faktual terkini, karena masih banyaknya bukti-bukti intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi ini menimbulkan pertentangan/konflik, seperti konflik di Sampang, Madura. Kekerasan yang dialami komunitas Syiah di Sampang, Madura, telah terjadi sejak tahun 1980. Rentetan kekerasan ini terus berlangsung hingga terjadi ledakan kekerasan dan penyerangan pada Agustus 2012 lalu yang memakan korban jiwa dan harta benda. Konflik ini muncul karena rendahnya implementasi nilai-nilai keagamaan yang berwawasan multikultur di Sampang, Madura. Pemicu munculnya aksi kekerasan berawal dari konflik individu, namun meletus menjadi konflik kolektif. Puncak aksi kekerasan massal terjadi ketika masjid dan rumah komunitas Syi'ah dibakar oleh komunitas anti Syi'ah. Saat ini 400 warga Syiah yang mengungsi di GOR Sampang sejak Agustus 2012 menolak relokasi dan ingin kembali ke kampung halaman. Sementara mayoritas warga dari dua Desa bekas konflik (anti Syiah) menuntut tetap menolak pengungsi Syiah kembali ke Desanya. Bila tetap memaksa kembali ke kampungnya, pengikut aliran Tajul Muluk tersebut (Syi'ah) harus kembali ke Ahli Sunnah Wal Jamaah.

¹ Dipresentasikan pada Konggres Pancasila ke-V, 1 Juni 2013, di UGM Yogyakarta

² Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tulisan ini membahas bagaimana merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mereduksi konflik masyarakat, terutama yang terjadi di Sampang, Madura.

Kata Kunci: *Revitalisasi, nilai-nilai, reduksi, konflik masyarakat.*

Pendahuluan

Pancasila adalah falsafah, dasar negara, sistem nilai fundamental bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berlaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, muncul pengaruh negatif globalisasi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila masih sebatas pada tataran teori, sementara pada prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila belum dapat diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat.

Degradasi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan, menimbulkan konflik horisontal. Nilai-nilai Pancasila tersebut sering kali dianggap tidak berperan ketika dihadapkan pada konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain adalah konflik antar ras atau suku di Kalimantan, antar kelompok beragama seperti pembakaran gereja atau masjid (peristiwa ketapang, Jakarta 1998, Kupang, Januari 1999, Gereja GKI Bogor Desember 2012), antar jamaah atau madzhab (Ahmadiyah di Cikeusik 6 Februari 2011, Syiah di Sampang, Madura pada Desember 2011), penjarahan, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan.

Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat atau adat belum mampu menyelesaikan konflik, karena kurang memperhatikan norma dan ketentuan yang berlaku di daerahnya. Konflik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mereduksi konflik masyarakat di Indonesia? Tujuan penulisan antara lain: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pelebagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama, sosial, budaya; meningkatkan ketertiban hidup antar-umat beragama serta

penganut aliran kepercayaan, perlu dikembangkan sikap hidup yang penuh dengan toleransi, persaudaraan, kesetaraan, dan kerukunan dengan mempertimbangkan kebhinnekaan bangsa Indonesia; dan meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang berwawasan multikultural.

Kerangka Teori

Konflik sosial dapat diartikan dua hal: *pertama*, perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial; *kedua*, pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan (Adam Kuper, 2000: 155). Jenis konflik umumnya berlangsung dalam konteks hubungan saling tergantung dan hubungan pertukaran yang melembaga, sehingga jenis konflik yang satu dengan yang lain selalu terdapat kemiripan, meskipun variasi juga selalu ada. Dari berbagai jenis konflik tersebut, ada tiga varian terpenting yang saling terkait, yakni *pertama*, karakter pihak yang berkonflik, *kedua*, hakekat tujuan serta *ketiga*, sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri (Adam Kuper, 2000: 156).

Pertama, pihak yang berkonflik pada 26 Agustus 2012 di Sampang, Madura, mulanya antara komunitas Syiah dan anti Syi'ah (Sunni) pada tahun 1980. Seiring perjalanan waktu konflik berubah semakin kompleks, karena yang terjadi kemudian adalah konflik antara komunitas Syiah dan anti Syiah (Sunni), yang didukung MUI dan Pemerintah. Anti Syiah didukung Pemerintah Sampang dengan asumsi mengikuti aspirasi suara mayoritas yang diperkuat oleh vonis terhadap pimpinan Syiah dan fatwa sesat MUI setempat. Komunitas Syiah dan Sunni berada dalam satu Kecamatan bahkan mereka hidup berdampingan atau bertetangga, tetapi tidak ada relasi yang harmonis di antara mereka.

Kedua, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan. Sebagaimana dimaklumi, mulanya konflik di Kecamatan Omben tersebut ditengarai dimotivasi perbedaan dalam internal keluarga. Namun dalam perjalanannya, konflik horisontal tersebut semakin luas karena perbedaan keyakinan menyusup bahkan dijadikan pemantik dalam konflik mutakhir.

Ketiga, konflik dapat pula dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara yang digunakan oleh MUI setempat dan kementerian Agama dengan

menegaskan bahwa Syiah sebagai aliran sesat, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti ihwal fatwa sesat terhadap kelompok minoritas lainnya, fatwa tersebut kerap digunakan secara sewenang-wenang untuk mengeksekusi, bahkan menebarkan kebencian terhadap warga Syiah. Konsekuensinya, muncul sebuah pandangan bahwa warga penganut Syiah tidak diperkenankan untuk tinggal di Kabupaten Sampang.

Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya (Lewis Coser, 1956, hal.151). Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Konflik yang terjadi bertahun-tahun antara komunitas Syiah dan Sunni menurut Coser akan memperkuat identitas kelompok.

Coser membagi konflik menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam berinteraksi dan umumnya ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya komunitas Sunni membakar rumah dan masjid komunitas Syiah
2. Konflik Non-Realistis, konflik yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh atau santet. Coser menjelaskan bahwa ada suatu kemungkinan seseorang atau kelompok terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Misalnya, Komunitas Syiah akan agresif melindungi kelompoknya, tetapi setelah berada di luar desa, komunitas Syiah dan Sunni melupakan perbedaan dan berinteraksi atau berkomunikasi secara aktif.

Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intens, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin

besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan sesama penjual sate, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan (komunitas Syiah dan anti Syiah) mengungkapkan perasaan bermusuhan. Hal ini berbahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar melampaui batas, maka akan menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut, seperti yang terjadi pada Agustus 2012.

Coser menjelaskan bahwa untuk meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok, peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan (Lewis Coser, 1967, 32-70). Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil, konflik *in-group* merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat, kuat dan stabil. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan (Lewis Coser, 1967: 32-70).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka. Sumber data adalah dokumentasi yang berkaitan dengan konflik sosial di Sampang, Madura, yang terjadi pada Agustus 2012. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan dan menganalisis konflik sosial di Sampang, Madura. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis berdasarkan pada teori konflik Lewis A. Coser. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu penalaran yang berawal dari data pada konflik komunitas Syi'ah dan Sunni di Madura .

Pembahasan

Akar permasalahan dan kronologis terjadinya konflik yang terjadi di Sampang, Madura, bahwa akhlak dan perilaku masyarakat sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila seharusnya dijadikan pedoman dalam berfikir dan bertindak, realitasnya nilai-nilai Pancasila bukan lagi menjadi arah dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta yang berkaitan dengan perilaku bangsa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, adalah penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila

1. Nilai Ketuhanan. Fenomena nilai agama yang dinomor-duakan, sementara nilai adat atau madzab menjadi hal yang utama. Setiap orang mempunyai kebebasan dalam memahami agamanya, namun apabila ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya akan merusak akhlak masyarakat lain melalui penyebarannya. Hal ini akan menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap aliran tersebut, yang ditunjukkan melalui tindakan anarkhis sehingga muncul gejala sosial.
2. Nilai kemanusiaan. Sikap arogan masyarakat (elit dan bawah; dewasa, remaja dan anak-anak; berpendidikan atau belum) yang tidak menghargai kelompok lain dan mengutamakan kekerasan adalah cermin pengabaian nilai kemanusiaan.
3. Nilai persatuan. Perilaku mayoritas masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang cenderung bersikap individualistis, mendahulukan kepentingan pribadi atau komunitasnya di atas kepentingan bangsa dan negara. Fenomena primordialisme ini merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta ditinggalkannya budaya gotong royong yang disebabkan lunturnya rasa kebersamaan.
4. Nilai permusyawaratan. Fenomena masyarakat yang cenderung mengenyampingkan azas musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga permusyawaratan cenderung mengalami penurunan, karena kenyataannya lembaga tersebut hanya mementingkan kepentingan komunitasnya tanpa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum.

5. Nilai keadilan. Hal ini tercermin dari melunturnya sikap keadilan dalam bermasyarakat. Muncul ketidakadilan dalam berbagai aspek: ekonomi, budaya hidup konsumtif, kurang menghargai karya orang lain (perusakan sarana prasarana umum) dan hukum.

Bangsa Indonesia sangat populer sebagai bangsa yang pluralis (agama, etnis dan bahasa) dengan ciri-ciri yang sangat khas, unik dan spesifik. Kemajemukan yang khas dimiliki bangsa ini tercermin dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dipertahankan, terutama untuk mereduksi berbagai permasalahan bangsa seperti konflik antar umat beragama, konflik antar etnis dan golongan serta tawuran yang sering terjadi.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mereduksi konflik

Strategi merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mereduksi konflik, antara lain:

1. Musyawarah atau dialog.

Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah, baik di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan maupun yang berkaitan dengan persoalan lain. *Local wisdom* (kearifan lokal) di Madura dikenal dengan istilah budaya *Carok*. Di dalam penyelesaian konflik tersebut selalu diutamakan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa untuk langsung menyerahkannya ke pemerintah (Hilman Hadikusuma, 1992:38). Budaya musyawarah selain lebih mendekatkan orang Madura satu sama lain juga dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang disebabkan oleh konflik. Kehadiran pemerintah dengan seperangkat karakteristiknya tidak saja menjadikan orang Madura sebagai orang yang suka bermusuhan, tapi juga menyebabkan konflik tersebut berkesinambungan. Pemerintah dengan aturan-aturannya membawa beban bagi nilai-nilai budaya masyarakat Madura (Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3, M. Syamsuddin, 2008).

Adanya dialog yang intensif dan terbuka antara Sunni-Syiah pada level akar rumput. Tokoh agama (MUI), pemuka adat, tokoh masyarakat dari pihak Syiah dan Sunni seharusnya menghilangkan kepentingan politisnya dan

kepentingan organisasinya untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu perdamaian. Dalam dialog tidak perlu menonjolkan sisi negatif, justru yang paling penting adalah menonjolkan sisi positif Syiah dan Sunni. Perihal jalan menuju dialog Sunni-Syiah sebenarnya pernah dirintis oleh KH Abdurrahman Wahid saat menegaskan bahwa NU adalah Syiah kultural. Hal tersebut mengacu pada sejumlah ritual dan tradisi yang berkembang di dalam lingkungan NU yang sebenarnya mengadaptasi dari tradisi Syiah. Dalam musyawarah, Ulama sebaiknya memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada masyarakat yang sedang berkonflik agar konflik tidak terjadi lagi.

2. Mediasi

Bila melalui jalur musyawarah tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalur mediasi atau pihak ketiga sebagai mediator/penengah. Pihak netral sebagai mediator yang paling berkompeten adalah pemerintah. Pemerintahpun diharapkan menghilangkan kepentingan ekonomi dan politisnya dan mengambil posisi netral, tidak berpihak pada yang Sunni dan pihak yang Syiah dalam mempertimbangkan keputusan akhir. Keputusan akhir tetap ada di tangan kedua pihak. Peran mediator yang menjembati antara komunitas Syiah dan Suni, dapat menawarkan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

3. Pendidikan Pluralisme

Pendidikan pluralisme yaitu suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas. Reformasi pendidikan melalui kurikulum yang berbasis multikultur atau keanekaragaman, memungkinkan masyarakat dapat bersikap toleran. Masyarakat dapat ‘membongkar’ teologi agama masing-masing yang selama ini cenderung ditampilkan secara eksklusif dan dogmatis. Sebuah teologi yang biasanya hanya mengklaim bahwa hanya agamanya yang bisa membangun kesejahteraan duniawi dan mengantarkan manusia dalam surga Tuhan.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di Sampang, Madura harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penegakan hukum juga merupakan elemen penting dalam penyelesaian konflik. Langkah ini penting agar siapa pun di negeri ini tidak mudah menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Kekerasan yang berulang-ulang dilakukan oleh sebuah kelompok karena tidak ada sanksi hukum yang tegas dan berat terhadap pelaku kekerasan, akan selalu terulang di masa yang akan datang. Mestinya, mereka yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan keyakinan dan agama mendapat ganjaran yang setimpal karena mereka telah melakukan dua pelanggaran sekaligus yaitu norma hukum dan norma agama yang sama sekali tidak membenarkan kekerasan. Pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap kelompok yang menebarkan kebencian dan kekerasan di negeri ini karena sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, apa pun agama, suku, ras, dan alirannya. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

5. Pembinaan Etika (akhlak)

Sejarah menunjukkan bahwa implementasi dan konsistensi Pancasila mengalami pasang-surut yang disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan komitmen pimpinan nasional. Oleh karenanya, pimpinan nasional sudah seharusnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Para pejabat pemerintahan, pejabat negara, tokoh masyarakat, para ulama dan tokoh pemuda, baik yang ada di pusat dan daerah memberi contoh/teladan dan perbuatan yang nyata. Etika (akhlak) dalam mewujudkan cita-cita tersebut harus selalu diperhatikan dengan penuh antisipasi, karena dengan bekal ini pergolakan atau konflik apapun akan dapat dikendalikan dengan baik, dan dengan sendirinya akan dapat medatangkan kondisi yang lebih baik (*masalah*).

Kesimpulan

Hubungan erat antara masyarakat dan Nilai-nilai Pancasila bukan berarti Pancasila yang harus menyesuaikan masyarakatnya. Tetapi perilaku masyarakat sebagai tolak ukur terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemajemukan dalam masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan terjadinya konflik. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat walaupun berbau agama dan etnis sering dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar agama sebagai ras, budaya, suku, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tidak terlalu berperan mengatasi konflik karena dikesampingkan oleh ego dan identitas kelompok.

Strategi merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mereduksi konflik sosial di Indonesia khususnya di Sampang, Madura, antara lain melalui: musyawarah atau dialog, mediasi, pendidikan pluralisme, penegakan hukum dan pembinaan akhlak atau etika.

Daftar Pustaka

- Achmad, Nur. 2001. *Pluralitas Agama, Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Islam Abad 21, Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*. Terj. Samson rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy'arie, Musa dkk. 1988. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong EraIndustrialisasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Coser , Lewis. 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press. page. 32-70
- 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press, , hal.151-210
- Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Adam Kuper, Jessica Kuper. 2000. Penerjemah, Haris Munandar, Ed.1 Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 155
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- <http://crcs.ugm.ac.id/article/817/Politik-Penodaan-dalam-Kasus-Syiah-Sampang>. akses 19 Mei 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik. akses 19 Mei 2013.
- <http://nasional.sindonews.com/read/18/667841/konflik-sunni-syiah-di-madura>. akses 28/08/ 2012.

- Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3. 2008. M. Syamsudin, "The Burden of Indigenous People In Dealing with State Regulation".
- Pruitt, Dean G. dan Rubin Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial* (Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suara Pembaharuan, 23 September 2000. Frans Magnez Suseno. "Pendidikan Pluralisme".
- Sumartana. 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Jakarta.